

**SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID  
DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU  
KABUPATEN JENEPONTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**Oleh:**

**WENI AGUSTINA**

**NIM. 10100114243**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :**

**Nama** : Weni Agustina  
**Nim** : 10400114198  
**Tempat/Tgl Lahir** : Cambajawa, 17 Agustus 1996  
**Jur/ Prodi/Konsentrasi** : HAPK/Peradilan  
**Fakultas/ Program** : Syari'ah Dan Hukum  
**Alamat** : Samata  
**Judul** : Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid  
di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu  
Kabupaten Jeneponto

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dangelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALA UDDIN**  
M A K A S S A R

Samata, 19 Februari 2019

Penyusun,



**WENI AGUSTINA**  
**NIM. 10100114243**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO" yang disusun oleh Weni Agustina, NIM: 10100114243, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beherapa perbaikan).

Makassar, 15 Februari 2019 M  
10 Jumadil Akhir 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Munaqisy I : Dr. Hj. Halimah B. M.Ag.

Munaqisy II : Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag.

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ayahanda **Sirajuddin Ledeng** dan Ibunda **Suriati Dg Kebe** yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis sejak lahir sampai sekarang dengan tulus, penuh kasih sayang lahir dan batin, serta kepada Shuci Rahmadani selaku saudara penulis yang selalu mendukung dan memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Dr.H. Abdul Halim Talli, S.Ag.M.ag, selaku Wakil Dekan I, Dr. Hamsir S.H.M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muhammad Saleh Ridwan M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar , beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu saya atas penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I dan Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum serta staf jurusan Peradilan.
4. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. dan Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Hj. Halimah Basri, M.Ag. dan Dr. Alimuddin, M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan serta kritikan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pemerintah Kelurahan Sidenre dan seluruh warga masyarakatnya atas izin dan kesediaannya memberi informasi selama dilaksanakannya penelitian ini.
7. Seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Peradilan Kelas E, Khususnya Saudari Milantika Putri dan Asniar , Nurina Muhliah Puspitasari , Yulianti , yang selama ini menjadi teman seperjuangan, dan berbagi suka dan duka.
8. Saudara Muhajirin yang telah memberikan Motivasi , dukungan dalam membantu penyelesaian Skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Reguler Kecamatan Gantarang angkatan ke 57 di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kelurahan Mariorennu.

Harapan penulis mudah-mudahan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal „alamin.

Gowa, Agustus 2018  
Penulis

WENI AGUSTINA  
NIM: 10100114243



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	11-49
A. Tinjauan Umum Kewarisan Islam .....	11
1. Pengertian Kewarisan Islam .....	11
2. Asas-Asas Kewarisan.....	13
3. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan .....	16
4. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	20
5. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan .....	23
6. Penghalang Kewarisan.....	22
B. Tinjauan Umum Ahli Waris dan Bagiannya.....	25
1. Penggolongan Ahli Waris .....	25
2. Bagian-Bagian Ahli Waris .....	31

C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat.....	42
1. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat .....	42
2. Subyek Hukum Waris Adat .....	45
3. Objek Hukum Waris Adat .....	46
4. Peristiwa Hukum Waris Adat .....	46
5. Keturunan Sayyid .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>51-54</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Instrumen Data.....	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	54
G. Pengujian Keabsahan Data .....	54
<b>BAB IV SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT</b>	
<b>SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN</b>	
<b>BINAMU KABUPATEN JENEPONTO.....</b>	<b>55-65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Cara Pembagian Kewarisan Masyarakat <i>Sayyid</i> Di	
Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten	
Jeneponto .....	57
C. Status Ahli Waris Anak Perempuan Keturunan <i>Sayyid</i> terhadap	
Harta Warisan Orang Tua .....	60
D. Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat <i>Sayyid</i> ditinjau	
dari Hukum Islam .....	63

BAB V PENUTUP.....	66-68
A. Kesimpulan .....	66
B. Implikasi Penelitian .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69-70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ﻯ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah(i)*.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*,*khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

### 10. Huruf Kapital

Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

**Nama : Weni Agustina**

**Nim : 10100114243**

**Judul Skripsi : Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**

---

Skripsi ini membahas tentang sistem pembagian kewarisan masyarakat Sayyid, Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu: Cara Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid, Status Ahli Waris anak perempuan Keturunan Sayyid Terhadap Harta warisan orang tua, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu *field research deskriptif kualitatif* dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang masalah ini maka digunakan metode Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan masyarakat sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto , memiliki masing-masing pendapat yaitu Hukum Kewarisan Islam dan sistem Kekeluargaan sesuai dengan harta warisan peninggalan, pada sistem kewarisan masyarakat *Sayyid*, lebih memilih menggunakan hukum adatnya dalam persoalan kewarisan. Alasannya, jika menggunakan hukum Islam, lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya karena didalam hukum Islam, adanya perbedaan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Jika dikaitkan dengan masa sekarang antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaaan. Sehingga masyarakat lebih memilih hukum adat yang dimana antara laki-laki dan perempuan di sama ratakan kewarisannya , meskipun dibedakan tidak terlalu jauh beda, dan dikalangan *sayyid* Al-Aidid Kebiasaan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan *sayyid* yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris.

Implikasi dari penelitian yaitu untuk mewujudkan hukum kewarisan yang baik perlu adanya pembelajaran dari para tokoh Agama untuk memberikan nasehat tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia, kehidupan dan hukum kewarisan sudah menjadi ketentuan Allah swt. Bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia, masa manusia ditakdirkan hidup setelah di lahirkan dan masa meninggal dunia dalam waktu yang telah di takdirkan oleh Allah swt. Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dengan sesamanya.<sup>1</sup>

Manusia tidak bisa hidup tanpa ada aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. Pada setiap kehidupan, baik itu kehidupan primitif maupun yang sudah sangat modern, pasti ada jenis aturan atau hukum yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat setempat. Oleh Harijah Damis, Abdul Manan mengatakan bahwa “hukum-hukum yang dibuat sesuai dengan tata kehidupan masyarakat yang hidup dalam masyarakat, hukum lahir dari masyarakat yang terus berkembang”. Itulah sebabnya manusia sejak lahir kedunia hingga meninggal dunia, telah diatur dan dilindungi oleh hukum.<sup>2</sup>

Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama yang berasal dari ajaran tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-Nya.

---

<sup>1</sup>Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2013), h. 3.

<sup>2</sup>Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, (Cet I; Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013), h. 6

Alat pengontrol sistem norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya.<sup>3</sup>

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur kewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem kewarisan yaitu sistem hukum kewarisan menurut KUH perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai Hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya Hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan mereka yang anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada Hukum waris perdata , Hukum Waris Islam dan Hukum waris adat.<sup>4</sup>

Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagiannya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, materialistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Karena itu perlu ada sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Salah satu dari sistem hukum itu adalah hukum kewarisan yang dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqih Mawaris (Faraid).

---

<sup>3</sup>Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Ed. 1, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

<sup>4</sup> Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993), h. 23.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat di pengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara “bihneka tunggal ika” yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman. Sistem kewarisan adat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain merupakan salah satu kekayaan budaya suku bangsa dan tak ternilai dan patut di pertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional.

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Alquran dan sunnah nabi, kemudian *qias* (analogi) dan *ijma'* (kesamaan pendapat). Dasar hukum waris Islam jelas tersurat dalam QS An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa / 4:7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya:

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, berikanlah harta waris orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama. (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam merupakan salah satu indikator kesadarab masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim pada khususnya. Olehnya itu, orang yang mengetahui hukum kewarisan Islam berbeda dengan orang yang kurang atau tidak mengetahuinya. Masyarakat yang tidak mengetahui hukum waris Islam biasanya menggunakan kewarisan dengan adat Masyarakat. Begitupula dengan masyarakat yang mengetahui hukum waris Islam namun karena hukum adat masih sangat menonjol di daerahnya sehingga menggunakan kewarisan dengan hukum adat. Yang mana pembagian harta warisan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum Adat

Salah satu daerah yang menggunakan sistem kewarisan adat adalah kabupaten Jeneponto. Di daerah ini terdapat komunitas *sayyid* yang memiliki sistem ataupun aturan tersendiri dalam pembagian harta warisan. Komunitas ini terletak di kelurahan Sidenre kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto. Komunitas ini masih menjunjung nilai-nilai dari para leluhurnya termasuk dalam hal pembagian harta

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2012), h. 77.

<sup>6</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (t.t.:Al-Maktabih-al-Tsaqatiyah Tsa.), h. 2.

warisan. Aturan pembagian harta warisan dalam lingkup masyarakat sayyid merupakan aturan yang tidak tertulis yang telah berlaku secara turun temurun, berdasar pada realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh seputar sistem pembagian kewarisan Masyarakat sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan ketentuan Hukum Kewarisan Sayyid pada prinsipnya asas Hukum Kewarisan Sayyid yang berlaku tentunya memiliki asas-asas yang sangat penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu diantaranya seperti asas kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam, namun tujuan dari diberlakukannya hukum waris masyarakat Sayyid ini.

Sayyid memiliki banyak sejarah. Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu nabi Muhammad. Mereka bergelar Habib bagi anak laki laki dan anak perempuan bergelar hababah. Golongan Sayyid di Sidenre bergelar Tuan untuk laki-laki dan bergelar Syarifah untuk perempuan. Sayyid yang mendiami kelurahan Sidenre berasal dari wilayah Cikoang, sehingga masyarakat sayyid di Sidenre dan di Cikoang memiliki garis keturunan yang sama.

Masyarakat Sayyid memiliki aturan tersendiri yang berlaku di komunitasnya dan sudah dianut secara turun temurun. Misalnya seorang perempuan sayyid (syarifah) tidak boleh menikah dengan orang yang di luar komunitasnya. Jika seorang syarifah nekad menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya, maka syarifah tersebut dianggap telah meninggal oleh keluarganya (nitumateangi) dan tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga besarnya.

Selain nitumateang, syarifah yang menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan.

Dalam setiap penelitian ada hal-hal yang membuat seorang peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, begitu pun dengan penulis, yang membuat penulis tertarik melakukan mengenai Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Sidenre. Karena penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam sistem Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Binamu Kelurahan Sidenre.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang menjadi Fokus Penelitian ini adalah “ **Bagaimana Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**” agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memaknainya.

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut:

- a. Sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- b. Pembagian yaitu proses atau cara, perbuatan membagi atau membagikan pekerjaan.



c. Masyarakat yaitu kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat yang menunjukkan adanya pemilikan atas norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat lapisan atau lingkungan sosial. Secara geografis dan sosiologis dapat dibedakan menjadi masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Sedangkan pengertian Masyarakat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan yang tertentu.<sup>7</sup>

Sayyid yaitu golongan keturunan al-Husain, cucu nabi Muhammad. Mereka bergelar Habib bagi anak laki laki dan anak perempuan bergelar hababah. Golongan Sayyid di Sidenre bergelar Tuan untuk laki-laki dan bergelar Syarifah untuk perempuan. Sayyid yang mendiami kelurahan Sidenre berasal dari wilayah Cikoang, sehingga masyarakat sayyid di Sidenre dan di Cikoang memiliki garis keturunan yang sama.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah ” Bagaimana Sistem Pembagian Kewarisan dalam Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembagian kewarisan dalam masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana Status Ahli Waris Anak Perempuan Keturunan Sayyid Terhadap Harta Warisan Orang Tua di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?

---

<sup>7</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia.h. 751

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian kewarisan di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan literature meliputi:

1. Muhammad Athoillah, *Fikih Waris: Metode pembagian waris praktis*. Cet. I; Bandung: Yrama Widya 2013. Buku ini berisi tentang penjelasan mengenai metode pembagian warisan secara praktis yang sangat berkaitan dengan karya tulis ini.
2. al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum oleh Fikri dan Wahidin tentang "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis", hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis dengan menggunakan sampel tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, serta Kelurahan Galung Maloang dan kelurahan Lompoe. Tahap selanjutnya yaitu membandingkan pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah tersebut, apakah menggunakan hukum Islam ataukah hukum adat. Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta warisan terjadi saat pewaris masih hidup (hibah) dan jumlahnya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, ada di antara warga masyarakat di wilayah tersebut yang tetap mempertahankan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia.
3. Hiksyani Nurkhadijah Skripsi di Universitas Hasanuddin (2013) menulis tentang "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoa di

Kabupaten Bulukumba” dalam penelitiannya sistem pembagian warisan pada masyarakat Ammatoa dilakukan secara kolektif bergilir (bersama-sama) dimana hasil dan pengelolaannya dilakukan secara bergilir sesuai dengan garis keturunan.

4. Amin Husein Nasution.2012. Hukum Kewarisan: Suatu analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012. Buku ini berisi tentang Hukum Kewarisan Islam serta Kompilasi Hukum Islam.
5. Dewi Wulansari.2012.Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar. Cet. II; Bandung: Rafika Aditama. Buku ini berisi tentang Hukum Waris Adat 2012. Selain buku-buku di atas, tentunya masih banyak lagi literatur-literatur yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.
6. Supardin dalam bukunya “Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)”. Buku ini menjelaskan tentang perbedaan fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Seperti membedakan sistem pembagian warisan termasuk penggolongan/pengelompokan menurut fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam di Indonesia.
7. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hukum kewarisan diatur dalam pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, berbeda lokasi data yang digunakan, Metode Pembagian Warisan Secara Praktis, Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis, Sistem Pembagian

Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan), sedangkan dalam kajian ini, penulis akan meneliti tentang Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Cara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
- b. Untuk Mengetahui Ahli Waris Anak Perempuan Keturunan Sayyid Terhadap Harta Warisan Orang Tua di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memperkaya kajian-kajian berkaitan dengan Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sayyid.
- b. Memperkaya pemahaman penulis berkaitan dengan Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Sayyid
- c. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi pemerhati hukum Kewarisan Islam

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum kewarisan Islam

##### 1. Pengertian kewarisan Islam

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; mengganti, memberi dan mewarisi. Dalam istilah fikih Islam, kewarisan (al-mawaris kata tunggalnya al-mirats) juga disebut dengan faraidh jamak dari faridhah.<sup>1</sup>

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mmengaur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing.

Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>2</sup>

Menurut Muh. Idris Ramulyo, *wirasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian yang lazim disebut hukum *faraidh*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ed. Revisi, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 281.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h.108.

<sup>3</sup>M. Idris Mulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: In Hill Co, 1991), h. 42.

Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, yang diambil dari kata *mafrudha* (مَفْرُوضًا) yang terdapat didalam Q.S An-Nisa/4 Ayat 7. Mafrudha pada ayat tersebut diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang dipastikan kadarnya).

Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya, hal ini sesuai dengan hadia Nabi Muhammad Saw.: “*sesungguhnya Allah Azza wazallah telah memberikan kepada orang yag berhak akan haknya, ingatlah tidak ada wasiat kepada ahli waris*”.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut as-Syarbini ilmu *faraidh* adalah ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.

Dari beberapa definisi diatas, maka secara singkat ilmu *faraidh* atau ilmu waris ialah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' Ulama daan Ijtihad Ulama).<sup>5</sup>

Maka sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak (tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Artinya dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur pokok yaitu ilmu tentang cara memindahkan hak dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak da menenukan kadar

---

<sup>4</sup>Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-husain, *kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2), h. 3.

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3.



atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisa tersebut.<sup>6</sup>

## **2. Asas-asas Kewarisan dalam Hukum Kewarisan Islam**

Kata asas berarti dasar yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat. Kata asas apabila diggandengkan dengan kata hukum menurut Van Eikema Hommes adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam bentuk hukum positif. Asas hukum dapat dipahami sebagai perinsip dasar atau petunjuk arah yang melahirkan peraturan-peraturan. Jadi, asas hukum kewarisan Islam adalah prinsip dasar atau petunjuk arah yang melahirkan peraturan-peraturan terkait dengan hukum kewarisan Islam<sup>7</sup>. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam adalah:

### **1. Asas Ketauhidan**

Asas ketauhidan adalah melaksanakan pembagian harta warisan terlebih dahulu didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw akan memperkuat keyakinan bahwa sistem kewarisan Islamlah yang benardan tepat dilaksanagn bagi mereka yang beragama Islam.

### **2. Asas Ijbari**

Asas ijbari mengandung suatu kepastian akan terajdinya peralihan arta setelah seseorang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris dan jumlahnya bagian dari ahli waris telah ditentukan dengan jelas (terinci) dan pasti. Peraihan

---

<sup>6</sup>Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4.

<sup>7</sup>Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014 ), h. 14.

harta peninggalan, siapa yang berhak dan berapa bagiannya masing-masing tidak tergantung pada kehendak ahli waris.

Asas ijbari mengandung kepastian dalam 3 (tiga) hal, yaitu peralihan harta warisn pewaris, besar bagian masing-masing ahli waris dan penentuan ahli waris yang berhak mendaapat harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

### 3. Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

### 4. Asas Individual

Asas individu mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individual atau secara perorangan. Pembagian secara individual didasarkan pada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.

### 5. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yakni mengandung pengertian harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang diemban. Hak warisan yang diterima oleh ahli waris kepada pewaris pada hakekatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewarsi terhadap keluarganya hingga kadar yang diterima ahli waris berimbang

denga perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang. Tanggug jawab dan kewajiban seorang laki-laki lebih besar dari tanggung jawab seorang perempuan.

#### 6. Asas Kematian

Asas kematian yakni hukum kewarisan Islam menetapkan peralihan harta warisan setelah seseorang yang mempunyai harta (pewaris) meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

#### 7. Asas Pembagian Seketika

Asas pembagian seketika adalah harta warisan pewaris harus diperhitungkan dan dibagi segera setelah pewaris meninggal. Tidak tuntasnya perhitungan dan pembagian harta warisan pewaris setelah meninggalkan dunia akan menimbulkan berbagai masalah berkelanjutan, baik antara para ahli waris maupun orang-orang yang terjakait dengan harta peninggalan, sehingga menjadikan perselisihan/konflik berkepanjangan antar ahli waris.<sup>8</sup>

#### 8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan)

Maksud dari *Huququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan, artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan.<sup>9</sup>

#### 9. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-Hak Dasar)

---

<sup>8</sup>Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, (Cet. I; Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013), h. 28.

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 6.

Pengertian *Huququn Thaba'iyah* adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya meskipun ahli waris itu seseorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadaapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

### 3. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan

#### 1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibiang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-Qur'an terdapat pada tiga ayat dalam surah yang sama, yaitu ayat 7, 11, 12 dan 176 surat An-Nisa. Ayat-ayat inilah yang disebut dengan ayat-ayat waris.<sup>10</sup>

##### a. Q.S An-Nisa/4:7

يَبِّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الْأَقْرَبُونَ  
مِثْلَهُ أَوْ كَثْرٌ نَّصِيبًا مَّقْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

##### b. Q.S An-Nisa/4:11

<sup>10</sup>Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014 ), h. 29.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya*, (Surakarta: Al-Hanan, 2012), h. 77.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا قَرِيبٌ لَّكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

c. Q.S An-Nisa/4:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h. 78.

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>13</sup>

d. Q.S An-Nisa/4 Ayat 176

يَسْتَقْسِمُونَكَ اللَّهُ يُقْتِيبُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ أَشْرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّتَيْنِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum dari Hadis

Selain dari Al-Qur'an, terdapat pula hadits yang menerangkan tentang hukum pembagian harta warisan ini. Hadits tersebut adalah:

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, , h. 79.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h. 106.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه مسلم)

Artinya:

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, berikanlah harta waris orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama.(HR. Muslim).<sup>15</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “laki-laki yang lebih utama” pada hadits diatas adalah kerabat laki-laki yang tedekat kekerabatannya dengan pewaris, kemudian jika masih ada sisanya beralih ke kerabat laki-laki lain yang urutan kedekatannya setelah kerabat yang pertama dan begitu seterusnya.

### 3. Dasar Hukum dari Ijma

Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Kerena telah disepakati oleh para saahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.<sup>16</sup>

Para sahabat Nabi, tabi'in (generasi setelah sahabat), dan tabi'it tabi'in (generasi setelah tabi'in), setelah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraidh* dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut. Kalangan sahabat nabi yang terkenal dengan pengetahuan ilmu faraidhnya ada empat, mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit dan Abdullah ibnu Mas'ud. Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam akan

<sup>15</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (t.t.:Al-Maktabah-TsaqTIYAH, t.th.), h. 2.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14.

menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka dalam satu masalah tertentu.

#### 4. Sumber Hukum dari Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama.

#### 4. Rukun dan Syarat Kewarisan

##### 1. Rukun-rukun waris

##### a. Adanya Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris yaitu orang yang meninggal, baik mati secara haqiqi maupun mati mukmy (suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, sesungguhnya ia belum mati sejati). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisa dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, yang beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.

##### b. Adanya Ahli Waris(*warits*)

Ahli waris adalah (*warits*) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan atau lainnya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan diwariskan.

Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar sibayi tersebut.

c. Adanya harta warisan (*Mauruts Atau Tirkah*)

Harta warisan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan harta warisan (*tirkah*) adalah apa-apa yang ditinggalkan

oleh orang yang meninggal dunia dibenarkan oleh syariat untuk di pusakai oleh para ahli waris.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih, setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang dan biaya pembayaran wasiat sipewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

Adanya harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat. Harta warisan ini dapat berbagai macam bentuk jenisnya seperti uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer, peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau dan lain-lain), rumah, sawah, tanah, kebun, toko, perusahaan dan segala sesuatu yang merupakan milik pewaris yang didalamnya ada nilai materinya.

Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Karena, pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.

---

<sup>17</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. II, Ed. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 25.

## 2. Syarat-syarat Waris

- a. Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal oleh hakim, karena setelah dinantikan hingga kurun waktu tertentu, tidak terdengar mengenai hidup matinya). Hal ini sering terjadi pada saat datang bencana alam, tenggelamnya kapal di lautan dan lain-lain.
- b. Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.
- d. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- e. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris).
- f. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- g. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.<sup>18</sup>

## 5. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Syariat Islam telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh harta peninggalan/harta pusaka, yakni: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah dan *wala'*. Sebab-sebab memperoleh warisan dapat pula dikelompokkan dalam dua sebab, yaitu *sabab* dan *nasab*. *Nasab* ialah hubungan kekeluargaan, sedangkan *sabab* mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*).

---

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 27.

## 1. Sebab mewarisi karena *sabab*

### a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah dan percampuran *syubhat*, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukunnya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara duda istri, atau masih dalam status tertalak raj'i, maka diantara keduanya terdapat hak saling mewarisi.

### b. Al-wala'

Al-wala' yaitu kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak. Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagai manusia bebas yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Karena itulah kepadanya dianugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak yang dibebaskannya itu meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya.

Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.<sup>19</sup>

## 2. Sebab mewarisi karena hubungan agama (sesama Muslim)

Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu

---

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 29.

identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan baagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

### 3. Sebab mewaris karena *Nasab*

Sebab *nasab* yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada daalam satu jalur hubungan ayah ke atas disebut *ushul*’, atau anak pada garis lurus ke bawah yang di sebut *furu*’ maupun pertalian darah garis menyamping seperti saudara, paman yang disebut *hawasyi*.

## 6. Penghalang Kewarisan

Faktor gugurnya hak mewarisi maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua faktor utama, yaitu faktor sifat atau disebut *mawani’ul irtsi* dan faktor kekerabatan.

### 1. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Maka jika ada anak yang membunuh orang tuanya dengan jalan apapun karena ingin segeea mendapatkan harta warisan, maaka sesungguhnya ia telah berdosa besar, yakni dosa membunuh orang tua dan juga dosa telah mengambil harta warisan yang bukan merupakan haknya. *Imam Malik* memberi pegecualian untuk kasus pembunuhan yang tanpa disengajan dan pembunuhan yang disengaja karena pembelaan diri. *Asy-Syafi’i* berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had tau qishash atau memberikan

kesaksian palsu yang menyebabkan pewaris dijatuhi hukuman mati atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati. Sedangkan ulama *Hanafiyyah* menentukan bahwa pembunuhan yang dapat mengugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarah*. Dalam pandangan ulama *Malikiyah* bahwa pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat mengugurkan hak waris. Ulama Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan yang menyatakan sebagai pengugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di qishash, membayar diat atau membayar kaffarah.

## 2. Berlainan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim walaupun ia adalah orang tua atau anak begitu pula sebaliknya. Demikian pula orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad menjadi penggugur hak mewarisi. Dalam hal ini telah menjadi kesepakatan bahwa murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Hal lain, ulama berbeda pendapat mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisi atau tidak. Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab dalam pandangan mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa "seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim".

## 3. Budak



Seseorang yang berstatus sebagai budak (yang belum merdeka) tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik majikannya. Baik budak itu sebagai budak murni, budak yang akan dinyatakan seandainya tuannya meninggal, ataupun budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, bagaimanapun keadaannya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik, terkecuali jika ia telah merdeka. Namun jika budak tersebut sudah benar-benar merdeka, misalnya karena dibebaskan oleh tuannya maka barulah ia berhak untuk mendapatkan hak waris dan juga mewariskan, karena status dia sudah sebagai orang merdeka.

#### 4. Faktor Kekerabatan

Dimaksud dengan penggugur karena faktor kekerabatan bahwa orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, tetapi karena kehadiran ahli waris lain yang menyebabkannya terhalang untuk memperoleh bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan terhalang sama sekali, orang yang demikian disebut *mahjub*. Sedangkan hijab adalah penghalang atau dinding yang merintangi mahjub sehingga tidak memperoleh warisan.

#### 5. Faktor Murtad

Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Karena ia telah keluar dari ajaran Islam, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) diantara individu-individu (yang berkeluarga).

Dasar hukum ditetapkannya orang murtad tidak mendapat warisan seperti disebutkan dalam hadits Nabi diriwayatkan Abu Bardah, yang menceritakan bahwa Abu Bardah telah diutus Nabi kepada laki-laki yang nikah dengan istrinya. Nabi supaya membunuh laki-laki itu dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Ahli Waris dan Bagiannya**

### **1. Penggolongan Ahli Waris**

Penggolongan ahli waris dapat dibedakan menjadi dua yaitu penggolongan atau pengelompokan ahli waris menurut fikih mawaris dan penggolongan atau pengelompokan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai penggolongan atau pengelompokan ahli waris:

#### **1. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Fikih Mawaris**

Penggolongan ahli waris dalam fikih mawaris meliputi: golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta kelompok atau golongan ahli waris dalam menerima harta warisan dari pewaris. Penggolongan ahli waris laki-laki dalam fikih mawaris adalah:

- a. Suami/duda (*al-Zauju*).
- b. Anak laki-laki (*al-ibnu*).
- c. Ayah (*al-abu*).
- d. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (*ibnu al-ibni*).
- e. Kakek shahih yaitu ayah dari ayah (*al-jaddu*).
- f. Saudara laki-laki sekandung (*al-akhu li al-abi*).

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, h. 42.

- g. Saudara laki-laki seayah (al-akhu li al-abi).
- h. Saudara laki-laki seibu (al-akhu li al-ummi).
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ibnu al-akhi al-Syaqiqu).
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (ibnu al-akhi li al-abi).
- k. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah (al-ammu al-syaqiqu).
- l. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (al-ammu li al-abi).
- m. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman sekandung (ibnu al-amma al-syaqiqu).
- n. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman seayah (ibnu aal-ammi li al-abi)<sup>21</sup>.

Penggolongan ahli waris dari pihak perempuan menurut fikih mawaris adalah terdiri atas:

- a. Istri (al-zaujah).
- b. Anak perempuan (al-bintu).
- c. Ibu (al-ummu).
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (bintu al-ibni).
- e. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibunya ibu atau nenek sah (al-jaddatu min jihatil-ummi).
- f. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibunya ayah (al-jaddatu min jihatil-abi).
- g. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqiqatu).
- h. Saudara perempuan seayah (al-ukhtu li al-abi).

---

<sup>21</sup>Supardin , *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*. (Cet.I; Jakarta: Alauddin University Press, 2016), h. 23.

- i. Saudara perempuan dari ibu (al-ukhtu lil ummi).

Apabila golongan dari jalur perempuan yang terdiri dari sembilan kelompok ahli waris perempuan tersebut semuanya ada, artinya ahli waris yang hanya golongan perempuan tersebut maka yang mendapatkan harta warisan hanya lima orang yaitu:

- a. Istri/janda (al-zaujah).
- b. Anak perempuan (al-bintu).
- c. Ibu (al-ummu).
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau paman laki-laki (bintu al-ibni).
- e. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqiqatu).

## 2. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam

Penggolongan ahli waris dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kelompok ahli waris. Penggolongan atau kelompok ahli waris tersebut meliputi:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

### 1. Menurut hubungan darah:

- a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

### 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda (suami) atau janda (istri)

- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>22</sup>

## 2. Bagian-Bagian Ahli Waris

### 1. Bagian-Bagian Ahli Waris menurut Fikih Mawarits

Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu:

#### a. Dzawil Furudh (Ashab Furudh)

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .

- a. Furudh  $\frac{1}{2}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah
  - Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja
  - Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
  - Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak
- b. Furudh  $\frac{1}{4}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah
  - Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak
  - Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak
- c. Furudh  $\frac{1}{8}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah
  - Istri, bila pewaris meninggalkan anak
- d. Furudh  $\frac{1}{6}$ . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah
  - Ayah, bila pewaris anak
  - Kakek, bilaa pewaris tidak meninggalkan anak
  - Ibu, bila pewaris meninggalkan anak

---

<sup>22</sup>Supardin , *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*. (Cet.I; Jakarta: Alauddin University Press, 2016), h. 45.

- Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
  - Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak
  - Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan
- e. Furudh 1/3. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah
- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara
  - Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.
- f. Furudh 2/3. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah
- Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang
  - Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.<sup>23</sup>

#### 1. Ahli Waris 'Ashabah (Yang Mendapat Semua Harta Atau 'Asabah)

'*Asabah* di dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai '*asabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada '*asabah*. Akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian '*ashabah*.

Para '*ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan:

- a. Anak laki-laki.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 44.

- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek (datuk) dari pihak baak dan terus keatas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki sebak.
- g. Anak saudara laki-lakikandung.
- h. Anak saudara laki-laki sebak.
- i. Paman yang sekandung dengan bapak.
- j. Paman yang sebak dengan bapak.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
- l. Anak laki-laki paman yang sebak dengan bapak.

‘Ashabah ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. *‘Ashabah bin Nafsi*

*‘Ashabah bin Nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain, penerimaannya adalah penerima *‘ashabah* dalam segala bentuk keadaan. Penerima *‘ashabah bin nafsih* adalah yang paling dekat dalam menerima warisan, sebagaimana susunan *‘ashabah* di atas (nomor 1 sd 12).

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

b. *‘Ashabah bil Gairi*

*'Ashabah bil Gairi* adalah 'ashabah dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi *'ashabah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'ashabah* dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'ashabah*.
3. Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'ashabah*.
4. Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'ashabah*.

c. *'Ashabah Ma'al Ghairi*

*'Ashabah Ma'al Ghairi* adalah 'ashabah bersama orang lain. 'ashabah ini hanya dua macam, yaitu:

1. Saudara perempuan sekandung

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'ashabah ma'al ghairi*. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

2. Saudara perempuan seapak

Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi



*'ashabah ma'al ghair*. Perlu di ingat bahwa saudara sekandung atau sebak dapat menjadi *'ashabah ma'al ghairi*, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi *'ashabah ma'al ghairi* (saudara sebak menjadi *'ashabah* karena ada saudaralaki-laki).

## 2. Ahli Waris Dzawil Arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh* dan *ashab al-ushubah*. Contohnya cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*).

Ahli waris dzawil arham ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Namun, karena kemungkinan adanya dzawil arham merupakan sesuatu yang bisa terjadi, maka di sini tetap diuraikan. Kadang-kadang untuk mengatasi dzawil arham, ditempuh melalui wasiat wajibah, atau wasiat. Karena bisa saja dzawil arham yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, tidak berhak menerima bagian warisan.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi hubungan jah dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Cet. I, Ed. Revisi; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 304.

- a. Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
- b. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang untuk mewarisi.

*Hijab* dalam pengertian lazim dalam *fiqh* adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan seseorang tidak memperoleh sama sekali (*hijab hirman*) atau berakibat mengurangi bagian perolehan harta warisan (*hijab nuqshan*).<sup>25</sup>

Ahli waris yang di *hijab* oleh sebagian ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Kakek (datuk) tidak mendapat warisan, selama ada bapak dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat warisan selama ibu.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki.
- c. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada:
  - 1. Anak laki-laki.
  - 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - 3. Bapak.
- d. Saudara seapak (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan, selama ada:
  - 1. Anak laki-laki.

---

<sup>25</sup>A.Sukri Sumardi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), h. 53.

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.
  4. Saudara laki-laki.
- e. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak (laki-laki atau perempuan).
  2. Cucu (laki-laki atau perempuan).
  3. Bapak.
  4. Kakek.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.
  4. Kakek.
  5. Saudara laki-laki sekandung.
  6. Saudara laki-laki seapak.
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.
  4. Kakek.
  5. Saudara laki-laki kandung.
  6. Saudara laki-laki seapak.
  7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.

- h. Paman sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.
  4. Kakek.
  5. Saudara laki-laki sekandung.
  6. Saudara laki-laki seapak.
  7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  8. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
- i. Paman yang seapak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.
  4. Kakek.
  5. Saudara laki-laki sekandung.
  6. Saudara laki-laki seapak.
  7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  8. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
  9. Paman yang sekandung dengan bapak.
- j. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.

4. Kakek.
  5. Saudara laki-laki sekandung.
  6. Saudara laki-laki seapak.
  7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  8. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
  9. Paman yang sekandung dengan bapak.
  10. Paman yang seapak dengan bapak.
- k. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  3. Bapak.
  4. Kakek.
  5. Saudara laki-laki sekandung.
  6. Saudara laki-laki seapak.
  7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  8. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
  9. Paman yang sekandung dengan bapak.
  10. Paman yang seapak dengan bapak.
- l. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan selama ada:
1. Anak laki-laki.
  2. Dua orang anak perempuan atau lebih.

Ahli waris yang tidak pernah terhijab *hirman* adalah:

- a. Anak laki-laki.

- b. Anak perempuan.
- c. Ayah.
- d. Ibu.
- e. Suami.
- f. Istri.

Para ahli waris yang terhibab nuqshan, ialah:

- a. Suami, saham  $\frac{1}{2}$  dapat menjadi  $\frac{1}{4}$  karena far'u waris.
- b. Istri, saham  $\frac{1}{4}$  dapat menjadi  $\frac{1}{8}$  karena far'u waris.
- c. Ibu, saham  $\frac{1}{3}$  dapat menjadi  $\frac{1}{6}$  karena far'u waris.
- d. Cucu perempuan pancar laki-laki, saham  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  ada far'u waris yang dekat, yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki (jika ada terhibab hirman).
- e. Saudara perempuan seayah, saham  $\frac{1}{2}$  dapat menjadi  $\frac{1}{6}$  karena adanya saudara perempuan.

Ulama membedakan antara *mahrum* (orang yang haram menerima harta warisan) dengan *mahjub* (orang yang terhalang menerima harta warisan). Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-mahrum* tidak layak mendapat warisan sama sekali, seperti orang yang membunuh pewaris, sedangkan *mahjub* merupakan orang yang mendapat harta warisan, hanya saja ia terhalang oleh seseorang (ahli waris) yang lebih utama (dekat) untuk mendapat harta warisan.
- b. *Al-mahrum* tidak memberikan pengaruh kepada ahli waris lain, ia tidak menghalangi sama sekali ahli waris lain, bahkan ia dianggap tidak ada. Sedangkan *al-mahjub* itu dapat memengaruhi orang lain, seperti jika tidak ada

ayah, maka saudara menghibab *nuqshan* ibu, ibu yang semula dapat  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ .

## 2. Bagian-Bagian Ahli Waris menurut Hukum Kewarisan Islam

Berikut adalah bagian-bagian ahli waris menurut hukum kewarisan Islam:

- a. Anak perempuan bila ia hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat sepertiga bagian.
- d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- e. Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.
- f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka ia mendapat seperdelapan bagian.
- g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

- h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

### ***C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat***

#### **1. Sistem Hukum Waris Adat**

Hukum kewarisan merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta kekayaan/warisan, kedudukan ahli waris, perolehan masing-masing ahli waris secara adil.<sup>26</sup>

Menurut Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi

---

<sup>26</sup>Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Sekarang*. (Cet.I, Ed.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 42.



secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>27</sup>

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (dubbel-unilateral). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateril).<sup>28</sup> Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana ahli waris mendapat bagian ahli waris dan menjadi hak miliknya secara penuh (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain). Ciri-ciri sistem kewarisan individual adalah:

1. Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepemilikannya kepada ahli waris, seperti bilateral Jawa atau Patrilineal Batak.
2. Bahwa ahli waris sama-sama mempunyai hak waris, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah harta warisan tidak dapat menjadi hak milik, tetapi menjadi hak bersama ahli waris (Minangkabau). Maka ciri kewarisan kolektif adalah:

---

<sup>27</sup>Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 81.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 260.

1. Harta peninggalan diwarisi sejumlah ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, disebut harta pusaka.
2. Harta peninggalan tersebut tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya oleh ahli waris.
3. Harta tersebut hanya boleh dibagi-bagikan pemakainnya, seperti matrilineal.

c. Sistem Kewarisan Majorat

Sistem kewarisan majorat adalah hak waris menjadi hak malik anak tunggal seluruhnya atau sejumlah harta pokok. Maka ciri sistem kewarisan majorat adalah:

1. Anak tertua pada saat meninggal berhak tunggal mewarisi seluruh harta peninggalan.
2. Berhak tunggal mewarisi sejumlah harta pokok.<sup>29</sup>

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

1. Garis Pokok Keutamaan

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris.
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris.

---

<sup>29</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007), h. 90.

- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.

## 2. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok keutamaan penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak lagi penghubungnya dengan pewaris.

## 2. Subyek Hukum Waris Adat

Pada hakikatnya subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris, pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan sipeninggal warisan. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki atau anak perempuan. apabila di adaakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.

Kelihatan bahwa pada masyarakat yang menganut prinsip garis katurunan patrilineal, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Berlainan dengan masyarakat patrilineal, pada masyarakat dengan sistem bilateral yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 263.

### 3. Objek Hukum Waris

Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa:

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang di bawah ke dalam keluarga.
- b. Usaha suami atau istri yang di peroleh sebelum dan sesudah perkawinan.
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami isteri pada waktu perkawinan
- d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.

### 4. Peristiwa Hukum Waris

#### 1. Bagian dan Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat hukum adat bilateral atau parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat patrilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang kebetulan menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. Sebabnya adalah bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tetua (laki-laki dan perempuan).

#### 2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Pada masyarakat adat di Indonesia, ahli waris itu mempunyai hak untuk menikmati harta warisan terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi bersama keluarganya. Adapun kewajibannya yaitu menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk

memelihara kelangsungan hidup dan membayar biaya-biaya selama pemakaman.<sup>31</sup>

#### **D. Keturunan Sayyid**

Masyarakat Sayyid merupakan golongan masyarakat yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah saw. Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ini bergelar Tuan untuk anak laki-laki dan Syarifah untuk anak perempuan. Sayyid di daerah ini bermarga al Aidid.<sup>32</sup>

Sayyid Asal mulanya dicikloang kemudian Kejeneponto dan Sayyid di kalangan Masyarakat Sidenre merupakan panggilan bagi keturunan Sayyid Jalaluddin. Sayyid dan Al-Aidid digunakan sebagai tanda pengenal atau atribut, bahwa mereka berasal dari kaum terhormat keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Masyarakat sangat patuh dan hormat pada kaum Sayyid. Sayyid dan Al-Aidid digunakan sebagai tambahan nama depan dan belakang untuk kaum pria dan nama panggilan wanita Sayyid disebut Syarifah.

Nenek moyang golongan Sayyid di Hadramaut adalah seorang yang bernama Ahmad bin Is yang dijuluki al-Muh jir dan menurut tradisi telah menetap di negeri itu selama 10 Abad. Ia berasal dari Bassora dan pindah bersama nenek moyang ke-80. Genealogi Sayyid Ahmad adalah demikian. Bin Is , Muhammad an-Naqib, bin Ali al-Uraidi, bin Ja`far

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 275.

<sup>32</sup> Syarifah Madinah Karaeng Bau ( 64 tahun), Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 23 Juli 2018.

asSadiq, bin Muhammad al-Baqir, bin Ali Zain al-Abidin, bin al-Husain (Van Den Berg, 1989). Di antara keluarga itu ada yang sudah keluar dari Hadramaut dan membuka pemukiman baru. Kemungkinan dari mereka yang hijrah itu di antaranya adalah keluarga Sayyid Jalaluddin. Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Bafaqih Al-Aidid lahir di Aceh 1603, dari pihak ibunya bernama Syarifah Khalisah bin Alwi Jamalilluui juga merupakan kerurunan Hadramaut yang masih keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah RA, putri Rasulullah Saw. Sayyid Jalaluddin sempat menuntut ilmu ke negeri Timur Tengah. Saat ia tiba di kerajaan Gowa Makassar pada abad 17 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, sempat singgah terlebih dahulu ke Banjarmasin untuk menyebarkan agama Islam. Di Makassar beliau kemudian diangkat menjadi Mufti kerajaan. Oleh Sayyid Jalaluddin, Putra Mahkota kerajaan Gowa diberi Nama Muhammad al-Baqir I Mallombassi Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan muridnya yang pertama, dan berguru padanya selama 16 tahun. Diberitakan bahwa Syekh Yusuf berguru kepadanya selama 3 tahun dan atas petunjuknya kemudian Syekh Yusuf diberangkatkan ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmunya. Beliau menikah dengan I „Accara Daeng Tami binti Sultan Abdul Kadir (Karaengta ri Bura“ne) Bin Sultan Alauddin, seorang putri bangsawan yang masih mempunyai darah kerajaan Gowa, dan mempunyai 5 orang anak. Saat ia pertama datang ke Makassar banyak yang meragukan bahwa ia seorang keturunan dari Hadramaut, karena pada saat itu faham Al-Aidid belum

menyebar di Indonesia, sehingga ia diacuhkan oleh sultan Makassar. Sehingga ia berpindah ke Cikoang dan menyebarkan agama Islam disana..

Beliau pamit pada Sombaya di Gowa dan kemudian menitipkan istrinya di Balla Lompoa, Gowa. Atas izin Allah SWT, Sayyid meninggalkan Balla Lompoa dengan menggunakan sehelai sajadah (tikar sembahyang) sebagai kendaraan pribadinya dan sebuah tempat air wudhu (cerek) menemaninya. Dalam waktu sekejap, Sayyid sudah sampai di sebelah utara pulau Tanakeke, kemudian sebelah utara Sungai Bontolanra, Parappa, Sanrobone, dan Sungai Maccinibaji (Saat itu tepat pada tahun 1632 M).

pada saat yang sama, di muara sungai Cikoang, sebelah utara hulu sungai, I Bunrang (kesatria Cikoang) memasang kuala (bila). Lalu, di sebelah selatan hulu sungai, I Danda (kesatria Cikoang) juga memasang kuala. Esoknya, I Danda dan I Bunrang melihat sebuah benda berbentuk kapal laut besar lewat di sebelah utara Tompo'tanah. Hanya dalam waktu sekejap, benda tersebut berubah bentuk menjadi benda bercahaya. Melihat itu, kedua kesatria Cikoang itu berlomba mendayung lepa-lepanya (perahu) mendekati benda itu. Saat mendekat, keduanya tercengang melihat seorang manusia memakai jubah, duduk bersila di atas sajadah ditemani cerek. Melihat keajaiban pada orang itu, Sayyid Jalaluddin, I Danda dan I Bunrang lalu menawarkan jasa pada Sayyid. Kedua perahu itu lalu dirapatkan. Sayyid kemudian meletakkan kaki kanannya di atas perahu I Danda dan kaki kirinya di perahu I Bunrang.

Kedua satria itu kemudian mendayung perahunya ke pinggiran sungai Cikoang. Mereka lalu mengabdikan pada Sayyid.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Syp. Tuan Lompo (55 tahun) Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 12 Juli 2018.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif atau penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang eksistensi hukum Islam pada sistem kewarisan masyarakat tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Sekalipun demikian data yang dikumpulkan memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu perhitungan.<sup>52</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dari informan. Penelitian tentang Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Yuridis-Empiris yang dengan kata lain penelitian jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan

---

<sup>52</sup>Strauss & corbin 2003 dalam *Pengertian Penelitian Kualitatif*, <http://www.diaryapipah.com/z05/pengertian-penelitian-kualitatif.html>

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>53</sup>

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan, melakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin maksudnya wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman yang memungkinkan variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dalam penelitian kepustakaan, maksudnya penelitian kepustakaan yaitu teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki.

---

<sup>53</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pada hakikatnya observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra.<sup>54</sup>

## 2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*Open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.<sup>55</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat berbagai macam literatur tertulis maupun tidak tertulis, serta gambar atau (foto) sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif.

### **E. Instrumen Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam jenis penelitian kualitatif, maka data kualitatif dapat berupa gambar, kata atau benda lainnya yang non angka. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), maka alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

---

<sup>54</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

<sup>55</sup>Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

1. Alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat beberapa hal yang menyangkut masalah yang akan diteliti.
2. Alat perekam yang akan digunakan untuk merekam beberapa hal yang menyangkut masalah yang akan diteliti.
3. Kamera yang akan digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti hasil penelitian.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang diperoleh kesimpulan. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah: dari hasil observasi dan wawancara lapangan diolah dan dianalisis kembali untuk memperoleh

- a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data yang diperoleh.
- b. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif maka harus didukung dengan data yang tepat pula. Derajat kepercayaan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian dengan konsep yang ada pada sasaran penelitian. Data di peroleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya dengan cara melakukan perbandingan data diperoleh dari informasi yang lain.

## BAB IV

### PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT *SAYYID* DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

##### 1. Letak Geografis

Kelurahan Sidenre terletak di ibu kota Kecamatan Binamu dengan luas wilayah 2,63 km. Kelurahan Sidenre bila ditinjau dari letaknya, maka kelurahan ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Empoang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Empoang Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai
4. Sebelah Barat dengan Sungai

Kelurahan Sidenre terdiri atas empat lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan Sidenre.
2. Lingkungan Bosalia.
3. Lingkungan Kunjung Mange Barat.
4. Lingkungan Kunjung Mange Timur.

Dari keseluruhan luas wilayah kelurahan Sidenre terdiri atas :

1. Lahan permukiman : 0,2 km
2. Pekuburan : 0,05 km
3. Pekarangan : 0,64 km
4. Lahan taman : 0,02 km

5. Lahan perkantoran : 0,45 km

6. Prasarana lain-lain : 1,27 km

Mata pencaharian masyarakat umumnya petani. Adapun dari segi agama 100% menganut Agama Islam, sedangkan dari segi kelembagaan di bidang pendidikan, kelurahan Sidenre memiliki 1 unit Madrasah Ibtidaiyah, 2 unit SD, 1 unit Mts dan 1 unit Madrasah Aliyah, sedangkan kelembagaan non pendidikan terdiri dari lembaga/organisasi masyarakat seperti, Karang Taruna.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kelurahan sidenre terdiri dari 1 unit Poskeslu sedangkan tenaga kesehatan terdiri dari satu orang bidan serta dua orang tenaga pendamping. Adapun sarana olahraga di Kelurahan Sidenre terdiri dari 1 unit lapangan futsal dan 4 buah mesjid sebagai sarana ibadah.

Di kelurahan ini dihuni sekitar 72 kepala keluarga (KK) yang secara keseluruhan merupakan keturunan Sayyid al Aidid. Adapun rinciannya yaitu di Lingkungan Bosalia terdiri dari 45 kepala keluarga, di Lingkungan Sidenre sekitar 10 kepala keluarga, di Lingkungan Kunjung Mange Barat sekitar 7 kepala keluarga dan di Lingkungan Kunjung Mange Barat sekitar 10 kepala keluarga.<sup>1</sup>

Adapun Struktur pemerintahan di Kelurahan Sidenre adalah sebagai berikut:

Lurah : Rizal Arizandy, SH

Sekretaris Lurah : Bahtiar, S.Ip

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari kantor Kelurahan Sidenre.

Kasi Pemerintahan : Dewi Siwati, SE

Kasi Ekbang : Kadir, S.Sos

Kai Kesos : Sitti Nurintang, SE

## **B. Cara Pembagian Warisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre**

Sistem Kewarisan Masyarakat Sayyid Beragam Ada yang menggunakan ada yang menggunakan hukum kewarisan Islam atau *Faraidh*, dan ada juga yang menggunakan Aturan sendiri sesuai dengan harta warisan peninggalan pewaris.

Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai faktor penyebab mendapatkannya. Dari hasil penelitian, di kalangan masyarakat Keturunan Sayyed di Sidenre, dalam menentukan hal ini sama dengan menentukan faktor penghalang mendapatkan warisan yang umumnya berpedoman kepada hukum kewarisan Islam, hanya saja terdapat sedikit perbedaan sebab dalam hal penghalang kewarisan selain berpatokan kepada aturan hukum kewarisan Islam, juga didasarkan kepada kebiasaan masyarakat yang justru bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Berbeda dengan Pada masyarakat pada umumnya , Masyarakat pada umumnya masih banyak menggunakan Hukum Adat sehingga ada namanya Perselisihan antara sama lain karena secara umum tidak membagi warisan secara adil.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris) serta pengoperan dan penerusan waris

dari pewaris kepada warisnya. Istilah hukum waris adat digunakan untuk membedakan hukum waris Islam, hukum waris nasional dan hukm waris lainnya. Hukum waris adat di Indonesia sangat terpengaruh oleh sikap budaya bangsa Indonesia, seperti sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan rukun dan damai daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.<sup>2</sup>

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>3</sup>

Hasil penelitian di lapangan mengenai kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid dalam melakukan pemutusan hubungan keluarga jika anak perempuan mereka menikahi laki-laki di luar komunitasnya bukanlah sebagai suatu hal yang asing, tetapi justru merupakan hal yang diketahui secara umum oleh masyarakat sidenre, terutama di kalangan orang dewasa. Hal ini juga sudah terjadi semenjak dahulu dan hingga saat ini kebiasaan tersebut masih terus ada.

Wawancara dilakukan Kepada Masyarakat/Karaeng Bau yang mengatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa Kabupaten Bulukumba, Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 29.

<sup>3</sup> H. Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.211.



*“ Rioloji intu nipakei injo Hukum Kewarisan Islamnga , pambagaenna njo rua banding se're, Mingka nakke ribijangku Tenamo Kupakei kamma kammayya inne , nakke anak baineiku kusare loe saba' ia tenapa natantu apa jama jamanna salla, mingka punna injo bura'nea pasti naissengji kalenna abboyayya doe'. Mingka punna se're waktu anak baineiku appakasiri atau bunting rurung taniai paranna anjo warisanna tala kusareangi , tena mantongmo pole kuakui kua iyanjo anakku’<sup>4</sup>.*

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut :

Sistem kewarisan yang berdasarkan hukum Islam hanya diterapkan pada zaman dahulu, perempuan pembagian bagi laki-laki dan perempuan 2 banding 1, dan pembagian yang seperti inilah sesuai dengan hukum Islam. Tetapi sekarang bagian laki-laki dan perempuan berbeda, Perempuan mendapatkan lebih banyak sebab kedepanya belum sempat ditahu dia bisa bekerja atau tidak , mengapa perempuan lebih banyak sebab laki-laki sudah pasti tahu cari uang. Akan tetapi jika perempuan menggar suatu aturan yg ada dalam keturunan menikah dengan bukan kkomunitasnya) maka tidak akan ada warisan untuknya dan dia sudah dianggap mati.

Selanjutnya dilakukan Wawancara kepada Tokoh Masyarakat/Tuan Ngewa:

*“ Riolo minawanga batena bage warisan menurut Hukum Islam , Mingka nenne kubage ratami baine naburu'ne , Batu ribarang barangaji pole punna injo Loei nibage ratai , mingka punna si'di nibage ta'si'dina. Manna niak si'di naguppa niak loe tena lekba nikua a'besere , assibuno. Tena pole nika langnuntut ripengadilanga. Saba' inne anung lebba ditetapakanmi.<sup>5</sup>*

Artinya: Dulunya pernah membagi warisan dengan cara Hukum Islam, tapi sekarang sudah memakasi Sistem kekeluargaan, Perempuan dan laki-laki dibagi secara merata, dan itu tergantung juga dari warisan yang ditinggalkan, biarpun ada yang mendapatkan sedikit itu tidak jadi masalah , tidak akan ada pertengkaran permusuhan , atau pembunuhan. Tidak akan ada juga yang namanya menuntut dipengadilan.

Selanjutnya dilakukan Wawancara kepada Tuan Lalo/Masyarakat

Sayyid :

*“Masalah Kewarisan dipalebbaki secara bija supaya tena tau gea'. Pembagianna batena nibage ratai tanpa nibedakangai baine naburu'ne. Mingka nia' se're waktu anjo bainea bunting rurung tau pantarangang (Bukan Sayyid} terhalangi anjo warisanna , nianggap matemi pole ritau*

---

2018 <sup>4</sup> Syarifah Madinah Karaeng Bau ( 64 tahun), Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 14 Juli

<sup>5</sup> Syp. Tuan Ngewa ( 56 tahun), Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 17 Juli 2018.

*toana , mingka punna tenaja nalolo karri tau toana akkule kijai napikkiri kana lanasarei warisan atau tena , laana anggap kijai anakna atau tena.*<sup>6</sup>  
Jika diartikan Dalam bahasa Indonesia Artinya :

Masalah kewarisan Sayyid diselesaikan secara kekeluargaan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris. Pembagian secara kekeluargaan dilakukan secara rata kepada ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi Dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini biasanya mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan orang tuanya, dikarenakan menurut adat setempat anak perempuan Keturunan Sayyid yang berani menikahi lakilaki di luar komunitasnya dianggap tidak pernah ada atau dianggap telah meninggal dunia. Menurut Tuan Lalo, salah seorang tokoh adat, bisa saja mereka mendapatkan harta warisan orang tuanya, tergantung dari karakter keluarganya. Keluarga yang memiliki watak yang tidak terlalu keras biasanya akan mempertimbangkan lagi hal tersebut.

### **C. Status Ahli Waris Anak Perempuan Keturunan Sayyid Terhadap Harta Warisan Orang Tua**

Menurut SA, nama samaran, ” *Tau toana injo bainea njo tau nikkaya rurung tau pantaranganna sayyidka, punna pabageang warisan, angguppa atau tena harta warisan untuk anakna tau melanggarka, biasana nirundingkangi rolo rikeluargayya. Apakah injo keluargaya setujuji atau tena nabagaei injo warisangi mange rianakna injo tau melanggarka. Tetapi biasana injo tau melanggarka tenamo nangguppa apa apa battu ritau toana , saba'na punna nasarei berarti nasetujui injo nagaukanga, dan menurut DR dan AH . Pada umumnya aia ngaseng injo naissengmi rattunnaji ca'di naisseng ngasengmi adat adatna na akibatna puna nalanggarki. DR dan AH, nama samaran, pada umumnya mereka sudah mengetahui akibat tersebut karena dari sejak kecil mereka telah diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kebiasaan komunitas mereka serta akibat jika melanggar ketentuan yang telah diatur oleh adat mereka iya ngase pole natambah'I punna pelanggaran injo nalakukanga merasa bebaski, hakna terpenuhi'I anni'kai rurung burukne pilihanna , dan mengenai masalah harta*

---

<sup>6</sup> Syp, Tuan Lalo' (43 tahun) Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 20 Juli 2018.

*warisanna tau toana tenamo napeduli anggupai atau tena saba'na bertentantangi rurung QS An-Nisa ayat 7,11,12,27”<sup>7</sup>*

Arti dalam bahasa indonesia:

orang tua anak perempuan yang menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya, dalam hal pembagian warisan, dapat atau tidaknya harta warisan terhadap anak mereka yang melakukan pelanggaran, biasanya akan dirundingkan dulu ke keluarga besar. Apakah keluarga besar setuju atau tidak untuk membagikan harta warisannya kepada anak perempuan mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi yang biasanya terjadi dalam keluarga mereka, anak perempuan tersebut tetap tidak dapat menerima harta warisan orang tuanya, karena jika si orang tua tetap ingin anaknya membagikan harta warisannya ke anak perempuannya, mereka dianggap telah menyetujui perbuatan anak perempuan mereka dan berakibat mereka juga akan dikucilkan dari lingkungan. Terhalangnya seorang anak mendapatkan harta warisan orang tuanya umumnya diterima begitu saja tanpa adanya upaya untuk melakukan perlawanan. Menurut wawancara terhadap dua orang anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya. Mereka juga menambahkan jika pelanggaran yang mereka lakukan membuat mereka merasa bebas, hak mereka terpenuhi dengan menikahi laki-laki pilihan mereka sendiri, dan mengenai masalah harta warisan orang tua mereka tidak peduli lagi apakah mereka akan mendapatkan atau tidak. Kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid yang melakukan pemutusan hubungan keluarga jika ada anak perempuan mereka yang menikahi laki-laki di luar komunitasnya menjadi terhalang mewaris bertentangan dengan isi al-Qur'an itu sendiri dalam Q.S An-nisa" 4/7,11,12, 176 yang dengan jelas telah membagi bagiannya masing-masing serta hukum kewarisan Islam yang telah menentukan secara rinci dan jelas mengenai hal-hal yang dapat dijadikan sebagai penghalang mewaris, seperti pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Untuk anak perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan ingin kembali ke keluarganya, Oleh karena itu, secara non litigasi sangat sulit bagi anak perempuan itu untuk kembali memperoleh haknya sebagaimana layaknya seorang ahli waris.

Kawin mawin antara syarifah dengan laki-laki dari luar komunitasnya itu tidak diperbolehkan karena untuk menjaga kenasaban di antara keluarga mereka.

---

<sup>7</sup> Syp, SA (50 Tahun), Keturunan Sayyid, Hasil Wawancara, Sidenre 26 Juli 2018.

kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid dalam melakukan pemutusan hubungan keluarga jika anak perempuan mereka menikahi laki-laki di luar komunitasnya bukanlah sebagai suatu hal yang asing, tetapi justru merupakan hal yang diketahui secara umum oleh masyarakat Sayyid di kalangan orang dewasa. Hal ini juga sudah terjadi semenjak dahulu dan hingga saat ini kebiasaan tersebut masih terus ada. Alasan-alasan yang memengaruhi seorang anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah di luar komunitasnya dianggap tidak cakap dalam hal mewaris hanya karena mereka menikahi laki-laki yang berasal dari luar komunitas mereka. kawin mawin antara syarifah dengan laki-laki dari luar komunitasnya itu tidak diperbolehkan karena untuk menjaga kenasaban di antara keluarga mereka.<sup>8</sup>

Mengenai kepatuhan komunitas Sayyid terhadap aturan yang dibuat berdasarkan pada keyakinannya sebagai itrah ahlulbait. Beberapa alasan komunitas Sayyid atas aturan adat yang dibuat berdasarkan atas:

1. Telah digariskan bahwa semua anak cucu Adam terputus nasabnya di hari kemudian. Hanya nasab nabi Muhammad SAW yang tidak akan terputus nasabnya di hari kemudian, kecuali anak cucunya sendiri yang memutuskan. Nasab itu terputus apabila para syarifah menikah dengan seseorang yang bukan Sayyid. Pernikahan semacam ini dianggap haram hukumnya dalam kehidupan komunitas Sayyid.
2. Didasarkan pada nasab Fatimah bahwa haram hukumnya nasab Fatimah menikah dengan nasab Adam dan cucunya tercipta dari tanah. Nabi Muhammad saw. dan keturunannya dianggap suci karena

---

<sup>8</sup> Syp. Tuan Ngewa ( 56 tahun), Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 17 Juli 2018.

Muhammad beralih ke Fatimah, nasab Fatimah diturunkan ke Hasan dan Husein, selanjutnya nasab itu beralih secara turun temurun sampai kepada Sayyid Jalaluddin.

Oleh karena itu, anak perempuan keturunan Sayyid yang melakukan pelanggaran, oleh keluarga mereka dianggap tidak pernah ada/tidak pernah lahir dalam kehidupan ini sehingga tidak cakap dalam hal mewaris. Sekalipun menurut hukum Islam hal-hal yang dapat dijadikan sebagai penghalang mewaris, seperti pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan; dan dalam al-Qur'an di surat an-Nisaa" ayat 7, 11, 12, dan 176 telah jelas ditentukan bagiannya masing-masing. Juga menurut hukum kewarisan Islam itu sendiri sebab-sebab seorang mewaris yaitu karena hubungan kekeluargaan, karena perkawinan, dan karena wala", masyarakat keturunan Sayyid ini tetap akan mengikuti apa-apa yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan komunitasnya. Akan tetapi menurut pendapat penulis, sekalipun hal tersebut secara tidak langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist bahwa mereka memiliki keistimewaan tersendiri sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, masyarakat keturunan Sayyid atau dikhususkan ke para orang tua yang memiliki anak perempuan yang melanggar adatnya, hendaknya juga melihat ayat-ayat al-Qur'an yang lain, yang di mana sudah dengan jelas disebutkan bagian-bagian harta warisan dari anak perempuan itu sendiri.

#### **D. Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam**

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak (tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Artinya dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur pokok yaitu ilmu tentang cara

memindahkan hak dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak dan menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.<sup>9</sup> Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam sudah semestinya menggunakan hukum kewarisan Islam dalam hal kewarisan, dan sistem pembagian kewarisan Sayyid masih menggunakan sebagian Hukum adat.

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat yang patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.<sup>10</sup>

Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sangat minim pengetahuan dan pemahaman tentang

---

<sup>9</sup>Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4.

<sup>10</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan hadis*, 15-16.

hukum waris Islam, dan cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan termasuk persoalan tentang kewarisan. Adanya hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan masih sangat kuat perkembangannya di masyarakat Sayyid ini, sehingga mereka semua lebih memilih hukum Adat yang di rasa adil dan cocok untuk melakukannya.

Karena pengetahuan dan pemahaman mereka rendah, serta mereka masih terbayang-bayangi dengan hukum Adat yang berlaku disana, meskipun mereka menganut agama Islam. Sehingga mereka hanya menganggap hukum Islam itu tekstual saja. Karena hukum waris Islam menurut mereka apabila lebih menimbulkan mudharatnya dari pada maslahatnya, yaitu dengan adanya perbedaan pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan. Padahal sekarang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan hampir sama, mengapa harus dibedakan dalam pembagian harta waris. Sehingga pada prakteknya mereka menggunakan hukum adat yang dirasa lebih adil di dalam menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta waris, yang tidak menimbulkan persengketaan di dalamnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sistem Kewarisan masyarakat Sayyid ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Sayyid Beragam , ada yang menggunakan hukum Kewarisan ada yang menggunakan hukum adatnya sendiri, belum Sepenuhnya Menggunakan hukum waris Islam, ada sebagian kecil masyarakat yang melihat situasi dan kondisi dalam keluarga mereka dalam membagikan harta waris.
2. Kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid yang melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.. Akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut dalam hal kewarisan yaitu terhalangnya hak mewaris terhadap harta warisan orang tua bagi anak perempuan keturunan Sayyid dan putusnya hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anaknya yang disebabkan oleh ambisi untuk mempertahankan kenasaban keluarga.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam membuat hukum waris Islam dikesampingkan. Serta timbulnya pemikiran masyarakat, penggunaan hukum waris Islam menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan, karena adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum kewarisan adat tidak ada perbedaan



jenis kelamin, ahli waris berhak mendapat warisan yang sama dan biasanya ahli waris dalam hukum kewarisan adat merupakan keluarga terdekat saja. Hukum kewarisan adat mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama sehingga minim terjadi perselisihan.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah peneliti untuk memberikan beberapa Implikasi sebagai berikut :

1. Mengingat Hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada umat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam Atau menggunakan Sistem Kewarisan Islam.
2. Kepada para tokoh adat, tokoh agama , tokoh masyarakat dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara Sistem dan Praktik kewarisan dalam hukum Islam dan Sistem Kewarisan Hukum Adat.
3. Masyarakat hendaknya menggunakan hukum kewarisan Islam adalah terciptanya rasa keadilan di masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Baik hukum waris Islam maupun hukum waris adat tentunya tujuan utama adanya hukum tersebut adalah untuk terciptanya rasa keadilan. Hal ini tergantung dari masyarakat memilih menggunakan hukum waris Islam ataupun hukum waris adat. Dan sebagai masyarakat yang menganut ajaran Islam, sebaiknya menggunakan hukum

waris Islam, sebab dengan menerapkannya secara tidak langsung telah mengamalkan Al-Quran dan hadis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husain Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Anshori Abdul, Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Ed.I, Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Damis, Harijah. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Cet I; Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Cipta. Bandung: Aditya Bhakti, 1993
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Istiqamah. *Hukum Waris dan Benda*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Surakarta: Al-Hanan, 2012), h. 77.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. II, Ed. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mulyo, M. Idris. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: In Hill Co, 1991.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- , *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Sekarang*. Cet.I, Ed.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007.
- Nurkhadijah, Hiksyani. *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013

- Roziqin, Choirur. *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015.
- Saifullah, Aep. Analisis Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Sumardi, A.Sukri. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Supardin. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2005.



L

A

M

P

I

R

A

N



### DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Rizal Arizandy  
Pekerjaan/Jabatan : Lurah Sidenre  
Alamat : Kelurahan Sidenre  
Wawancara : Tanggal 14 Juli 2018  
Umur : 35 tahun
2. Nama : Syarifah Madinah Karaeng Bau  
Pekerjaan/Jabatan : tokoh Masyarakat  
Alamat : kelurahan Sidenre  
Wawancara : Tanggal 16 Juli 2018  
Umur : 64 Tahun
3. Nama : Syp. Tuan Ngewa  
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat  
Alamat : Kelurahan Sidenre  
Wawancara : Tanggal 17 Juli 2017  
Umur : 56 Tahun
4. Nama : Syp. Tuan Lalo  
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Alamat : Kelurahan Sidenre  
Wawancara : Tanggal 17 Juli 2018  
Umur : 43 Tahun

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dilakukan kepada Lurah Sidenre





Wawancara dilakukan kepada Lingkungan Bosalia



Wawancara dilakukan Kepada Masyarakat Sayyid









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa  
☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-14/SH.01/PP.00.9/07/2018 Samata Gowa, 15 Juli 2018  
Sifat : Penting  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM Provinsi Sul-Sel  
Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Weni Agustina  
NIM : 10100114243  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Semester : VIII ( Delapan )  
Alamat : Villa Mulia Indah, Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**"Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ( Studi Kasus 2016-2017)".**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Supardin, M.H.I.  
2. Dr. H. Abd. Halim Tälli, M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Agutina terhitung mulai tanggal 12 Juli 2018 sampai 12 Agustus 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih

Wassalam  
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa (Sebagai Laporan)





1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 2 9 3 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3037/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Jeneponto

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1454/SH-01/PP.00.9/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **WENI AGUSTINA**  
Nomor Pokok : 10100114243  
Program Studi : HARK  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO (STUDI KASUS 2016-2017) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Juli s/d 23 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 18 Juli 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Penibina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Terbacaan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peninggal.





**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jl. Lingkar Nomor 30 Bontosunggu, Tlp: 0419-2410044 Jeneponto

Nomor : 0169/IPT/DPMPTSP/JP/VII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 23 Juli 2018  
Kepada :  
Yth. Lurah Sidenre  
Di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No. Surat 3037/S.01/PTSP/2018, Tanggal 18 Juli 2018, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : WENI AGUSTINA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : 10100114243  
Program Studi : Hukum Acara dan Kekeluargaan Jurusan  
Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Camba Jawa Kel. Tolo Kecamatan Kelara

Bermaksud melakukan Penelitian dan pengambilan data awal di daerah/kantor saudara sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**"SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU  
KABUPATEN JENEPONTO (STUDI KASUS 2016-2017)"**

yang berlangsung tanggal 18 Juli 2018 s/d 23 Agustus 2018

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip



Rp. 0,00



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 892 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI  
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan  
Nama : Weni Agustina  
NIM : 10100114243  
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 April 2018  
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
Judul : "Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus 2016-2017)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
Penguji I : Dr. Hj. Halimah, Basri, M.Ag  
Penguji II : Dr. Alimuddin, M.Ag  
Pelaksana : 1. Nasirah Asri, S.Kom  
2. Sri Hajati, S.H.I

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi  
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata Gowa  
Pada tanggal : 24 April 2018

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa  
Telp. 8418791 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIRING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI  
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Memeriksa

Surat Permohonan

Nama

Meni Agustina

N I M

10100114243

Jurusan

Ilmu Hukum Peradilan dan Kekeluargaan

Tanggal

Senin, 15 Oktober 2018

Hal

Ujian Seminar Hasil/Skripsi

Isi

Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Syekh di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Stud Kasus 2016/2017)

Menimbang

- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu dibentuk Panitia dan Dosen Penguji;
- c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1999 tentang Pemberian Keaslian dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

Sekretaris

Dr. Hj. Fatimah, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Jannah B, M.Ag

Penguji II

Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag

Pelaksana

1. Nasirah Asri, S.Kom

2. Sri Harah, S.H.I

Kedua

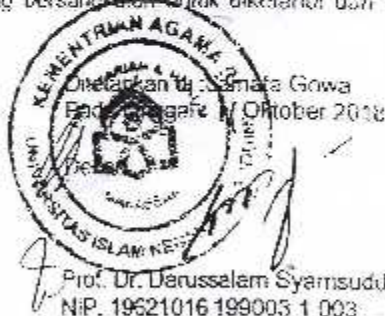
Ketiga

Panitia bertugas melaksanakan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNSP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Terbusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa.



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 177 Tahun 2019

**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2019**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan : Nama : Weni Agustina
  - NIM : 10100114243
  - Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
  - Hari/Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019
  - Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
  - Judul : "Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus 2016-2017)"
- Mengingat** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
  - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
  - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202-B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Penguji I : Dr. Hj. Halimah B. M.Ag.

Penguji II : Dr. Alimuddin, M.Ag.

Pelaksana : Nasirah Asri, S.Kom.

- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APRN/PNRP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Kesempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Samata  
: Januari 2019

1 embusan :  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
19621016 199003 1 003

## RIWAYAT PENULIS



Weni Agustina lahir di Cambajawa, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1996. Anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sirajuddin Dg Ledeng dan Ibu Suriati Dg Kebe. Tahapan pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari Pendidikan formal di taman Kanak-Kanak Darma wanita Kecamatan Kelara, lalu melanjutkan Pendidikan di SD Centre 05 Tolo hingga lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan pada Tingkat Menengah Pertama di Smp Negeri 1 Kelara hingga lulus pada tahun 2011, kemudian

Melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di Sma Negeri 1 Kelara hingga lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Peradilan, Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum.

